BAB IV

PERANCANGAN SISTEM

Analisis praktek kerja lapangan harus meliputi atau menjelaskan tentang sistem yang sedang berjalan dan sistem yang diusulkan pada perusahaan tersebut serta harus memperlihatkan masalah dan pemecahannya.

4.1 Analisis Sistem yang Berjalan

4.1.1 Analisis Dokumen

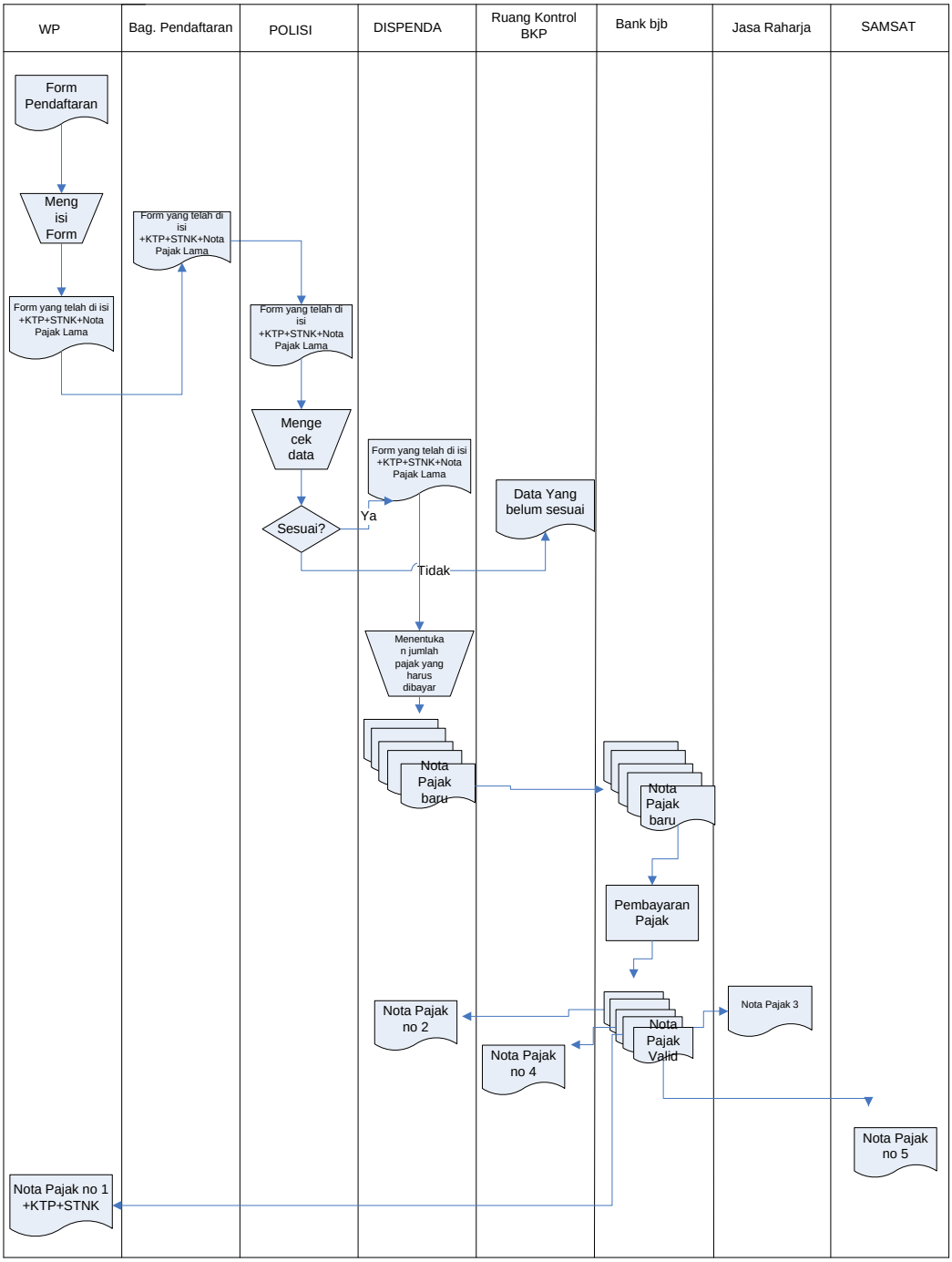
1. Nama Dokumen : Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB
   Yang terdiri dari 5 rangkap mempunyai keterangan Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat, No.Urut, No. SKUM, No Kohir, Merk, jenis, Tahun Pembuatan, Warna KB, Isi Silinder, Nomor Rangka, Nomer Mesin, No. BPKB, Bahan Bakar, Warna Bakar, Warna TNK, Masa Berlaku Biaya Yang Harus dibayar yang Lembar 1 untuk Wajib Pajak, Lembar 2 untuk Dispenda, Lembar 3 untuk Jasa Raharja, Lembar 4 untuk BKP dan Lembar 5 untuk SAMSAT. Surat keterangan ini digunakan sebagai bukti WP telah membayar pajak kendaraannya.
2. Nama Dokumen : Formulir Pendaftaran
   Yang terdiri dari 1 lembar mempunyai keterangan yang harus di isi Nomer Polisi untuk mendaftarkan pembayaran Pajak.

4.1.2 Analisis Prosedur yang sedang berjalan

a) Setelah formulir yang telah di isi oleh wajib pajak, kemudian WP menyerahkan formulir ke bagian pendaftaran untuk mendapatkan no antrian.
b) Setelah itu bagian pendaftaran menyerahkan ke bagian POLISI untuk mencocokan data yang sudah di isi oleh WP.

c) Jika data itu sudah cocok maka akan dilanjutkan ke DISPENDA untuk menentukan besarnya PKB, BBNKB baik pokok dengan atau dendanya lalu dibuatkan Nota Pajak yang terdiri 5 rangkap , jika tidak benar akan diserahkan ke Ruang Kontrol untuk memperbaiki data.
d) Setelah dari Dispenda lalu diserahkan Ke Bank bjb. Bank bjb menerima berkas dan Nota Pajak dari petugas Dispenda, lalu bank bjb memangil WP untuk melakukan pembayaran pajak.
e) Setelah WP membayar pajak akan divalidasi oleh pihak bank bjb nota pajak ke 1 ke bagian pengesahan, k2 ke dispenda, k3 Jasa raharja, k4 BKP dan Ke 5 ke SAMSAT.

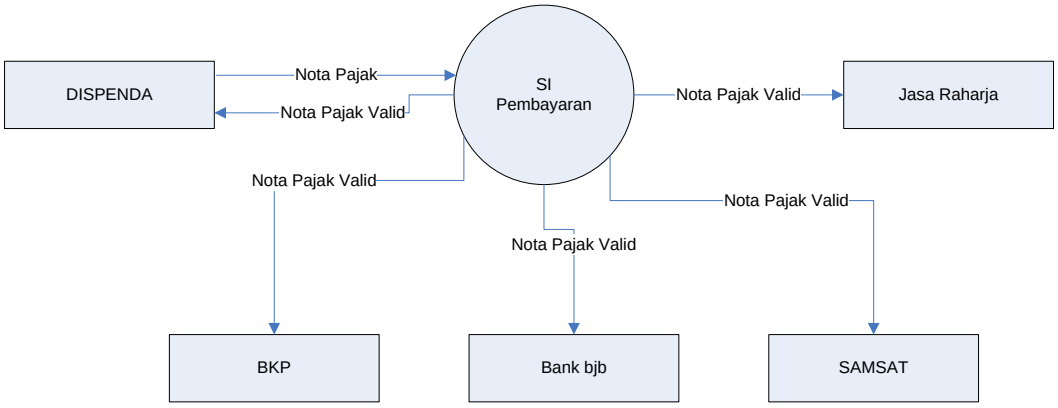
4.1.2.1 Flowmap



Gambar 4.1

Flowmap Pembayaran Pajak Kendaraan

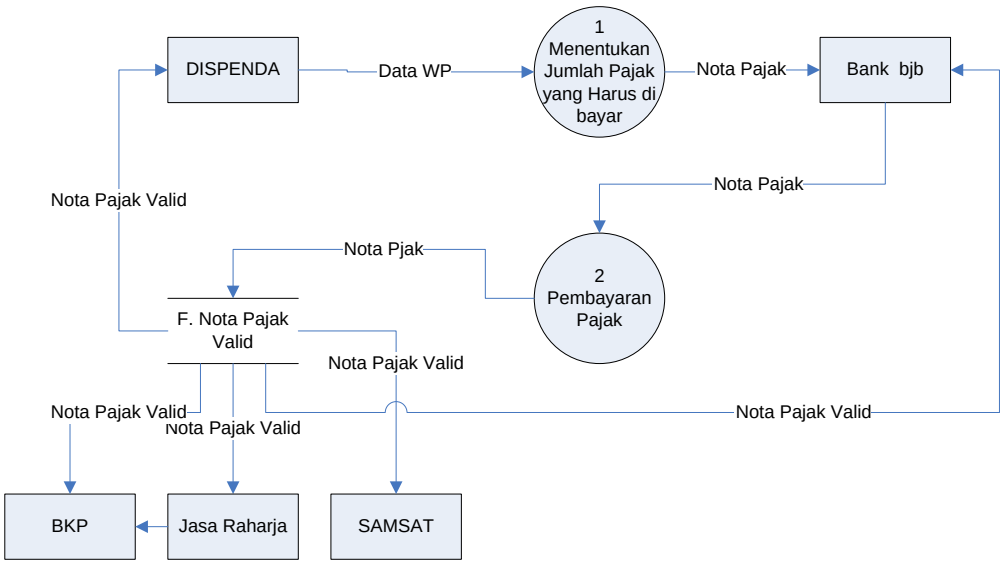
4.1.2.2 Diagram Konteks



Gambar 4.2

Diagram Konteks Pembayaran Pajak

4.1.2.3 Data Flow Diagram



Gambar 4.3

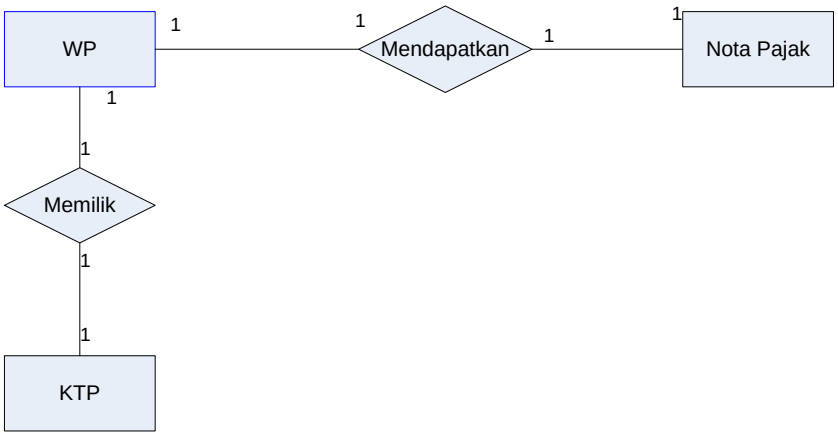
DFD Level 1 Pembayaran Pajak

4.1.2.4 Kamus Data

1. Nama Aliran Data : Data WP
   Deskripsi : Dok. Data WP
   Keterkaitan Proses : Dispenda-P1
   Alias : -
   Struktur Data : Kode_Form, Nopol, ID_STNK, ID_KTP

2. Nama Aliran Data : Nota Pajak
   Deskripsi : Dok. Pajak
   Keterkaitan Proses : P1-Bank bjb, Bank bjb-P2
   Alias : Nota Pajak Valid
   Struktur Data : Kode_Nota, Nomer Polisi, Nama Pemilik, Alamat, No.Urut,No. SKUM,No Kohir, Merk, jenis, Tahun Pembuatan, Warna KB, Isi Silinder, Nomor Rangka, Nomer Mesin, No. BPKB, Bahan Bakar, Warna Bakar, Warna TNK, Masa Berlaku Biaya Yang Harus dibayar.

4.1.2.5 Entity Relationship Diagram



Gambar 4.4

ERD Pembayaran Pajak

4.1.3 Evaluasi Sistem yang Berjalan

Pelayanan dalam pembayaran Pajak kendaraan bermotor sudah cukup baik karena sudah terkomputerisasi dalam pengerjaannya sehinnga dapat mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak bagi pegawai dan WP. Agar para Wajib Pajak tidak malas untuk membayar pajak karena SAMSAT mempermudah WP membayar pajak melalui Bank bjb.

Apabila terjadi perbedaan penerimaan PKB, BBNKB dan SWDKLLJ anatara pisik uang yang ada dengan bukti yang tertera pada Nota Pajak, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Bank bjb. Pengadaan, pemeliharaan serta pengembangan prasaran dan sarana kantor bersama SAMSAT dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemamppuan keuangan Daerah dibantu oleh (Persereo) A.K Jasa Raharja Jawa Barat dan Bank bjb. Ketertiban, kerahasiaan dan keamanan arsip keuangan Daerah dan Negara menjadi tanggungjawab bersama Instansi yang terkait dalam kantor bersama SAMSAT. Loket khusus

diadakanguna menampung permasalahan yang bersifat khusus. Selama dalam masa peralihan, fungsi kasir yang telah ada tetap berfungsi sebagai pembantu dan bertugas bersama-sama dengan petugas Bank bjb. Masih tedapat kesalahan dalam mengecek data dan harus menyulitkan WP yang aakan membayar pajak kendaraan bermotor yang harus mennunggu proses yang berjalan.